

---

---

## Upaya Pemerintah Indonesia Melakukan *Branding* Sistem Ekonomi Syariah Dalam Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018

Yunesta Eka Pratiwi<sup>1)</sup>, Ni Wayan Rainy Priadarsini<sup>2)</sup>, A.A Bagus Surya Widya Nugraha<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan upaya pemerintah Indonesia melakukan *branding* sistem ekonomi syariah dalam pertemuan tahunan *International Monetary Fund* dan *World Bank Group* 2018. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memasukan empat isu penting ke dalam forum tersebut. Salah satu isu penting yang dibawa oleh Indonesia ke dalam forum adalah tentang penguatan dan pengembangan sistem ekonomi syariah. Ekonomi Syariah merupakan salah satu sistem yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Sebagai populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi dalam mengembangkan keuangan dan ekonomi syariah. Penelitian ini menganalisis upaya Indonesia melakukan *branding* sistem ekonomi syariah melalui konsep *nation branding* dan diplomasi ekonomi yang ditulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini kemudian menemukan jawaban bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melakukan *branding* sistem ekonomi syariah yaitu dengan meluncurkan *Waqf Core Principle*, pengenalan *Green Waqf Linked Sukuk*, dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara dalam pertemuan tahunan *International Monetary Fund* dan *World Bank* 2018.

**Kata-kunci** : Diplomasi Ekonomi, Ekonomi Syariah, *Nation Branding*, Pertemuan Tahunan.

---

### Abstract

*This study aims to describe the Indonesian government's efforts to brand the Islamic economic system at the 2018 International Monetary Fund and World Bank Group annual meetings. Indonesia's selection as the host country provided an opportunity to introduce four important issues into the forum. One of the crucial issues brought by Indonesia to the forum was the strengthening and development of the Islamic economic system. Islamic Economy is one of the systems implemented by the Indonesian government. As the largest Muslim population in the world, Indonesia has the potential to develop Islamic finance and economics. Researcher examines Indonesia's efforts to brand the Islamic economic system through the concept of nation branding and economic diplomacy and written using qualitative-descriptive research methods. The research then perceives the answer that the Indonesian government's efforts to brand the Islamic economic system are by launching the Waqf Core Principles, the introduction of Green Waqf Linked Sukuk, and Indonesia's cooperation with countries at the 2018 International Monetary Fund and World Bank annual meetings.*

**Keywords** : Annual Meeting, Economic Diplomacy, Islamic Economic, Nation Branding.

---

**Kontak Penulis**

Yunesta Eka Pratiwi

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana  
Denpasar, 80114

E-mail : yunesta.pratiwi@gmail.com

## PENDAHULUAN

Tahun 2018 merupakan tahun bersejarah bagi masyarakat Indonesia karena di tahun itu Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan tahunan *International Monetary Fund* dan *World Bank Group*. Acara ini dimulai pada tanggal 8 – 15 Oktober 2018 yang bertempat di Nusa Dua Bali. Jumlah delegasi perwakilan negara yang hadir sebanyak 189 negara. Sebagai negara dengan keadaan ekonomi yang sedang berkembang, momentum tuan rumah ini sekaligus dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap negara (Sitorus, 2020). Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah dari ajang bergengsi ini memberikan kesempatan Indonesia untuk memasukan beberapa isu-isu penting yang akan dibahas dalam forum. Salah satu yang dibahas adalah mengenai penguatan sistem ekonomi syariah. Membawa topik ini kedalam ajang pertemuan tahunan IMF dan WBG 2018 merupakan sebuah kesempatan untuk memperkenalkan sistem ekonomi syariah Indonesia ke ranah global.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Niken Widiastuti mengatakan diangkatnya isu tentang ekonomi syariah ke dalam pertemuan prestigius ini menjadi suatu bahasan yang menarik karena ini merupakan kali pertama ekonomi syariah menjadi salah satu yang akan dibahas dalam forum sebesar IMF (Republika, 2018). Membawa topik ini kedalam ajang pertemuan tahunan IMF dan WBG 2018 merupakan sebuah kesempatan untuk memperkenalkan sistem ekonomi syariah Indonesia ke ranah global. Seperti yang diucapkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, bahwa ekonomi dan keuangan berbasis prinsip syariah telah menjadi format bisnis yang diakui secara global, banyak negara telah mengembangkannya, dan saatnya bagi

Indonesia untuk menggalakkan dan memajukan ekonomi berbasis syariahnya (Kompas, 2018).

Indonesia merupakan pasar terbesar di dunia untuk produk dan layanan yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Fakta ini terbukti melalui persentase penduduk Muslim yang mencapai 87,18% dari total populasi 232,5 juta jiwa (Global Islamic Economy Report, 2018). Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat di dunia dalam pengembangan sektor keuangan berdasarkan prinsip syariah, setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sementara itu, aset keuangan yang mengikuti prinsip syariah di Indonesia ditempatkan di posisi ketujuh secara global dengan total nilai aset sekitar 99 miliar Dolar AS (Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Ekonomi syariah memiliki peran yang penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ini menggambarkan bahwa pendekatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah menjadi salah satu alat untuk mendukung pencapaian SDGs.

Meskipun peringkat Indonesia masih menduduki peringkat 4 dalam pengembangan ekonomi syariah, tetapi penulis melihat adanya potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia menjadi pangsa pasar terbesar di global untuk produk dan layanan yang berasal dari ekonomi syariah. Upaya membangun *branding* ekonomi syariah dapat memperkuat posisi ekonomi syariah Indonesia di panggung dunia. Karena alasan ini *branding* "Ekonomi Syariah" menjadi langkah strategis dalam mempercepat perkembangan ekonomi syariah, dengan tujuan mendukung pencapaian visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah internasional.

Kemajuan ekonomi syariah di Indonesia mewakili salah satu ciri khas yang dapat diungkapkan Indonesia di arena internasional. Forum pertemuan tahunan IMF dan WBG ini

bisa menjadi wadah dalam melakukan *branding* yang pas dalam menggaungkan ekonomi syariah. Berdasarkan pada pemaparan latar belakang, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana upaya pemerintah Indonesia melakukan *branding* sistem ekonomi Syariah dalam pertemuan tahunan IMF dan WBG 2018.

Penelitian ini menggunakan dua literatur sebagai kajian pustaka, yang pertama literatur dari Dubravko Duby Zirovcic tahun 2016 yang berjudul "*Theoretical Principles of Economic Diplomacy*". Tulisan Zirovcic membantu peneliti memahami tentang konsep diplomasi ekonomi yang lebih luas dan melihat bagaimana diplomasi ekonomi dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan *nation branding*.

Literatur kedua penulis menggunakan tulisan Ryan Francis D. Gener tahun 2018 dengan judul "*Economic Diplomacy as Impetus for Philippine Domestic Reforms: Theory, Evidence, and Recommendations*". Dalam tulisannya, Gener menjelaskan tentang pentingnya menjalankan diplomasi ekonomi di negara berkembang dan menganalisis bagaimana upaya pemerintah negara berkembang dalam memaksimalkan diplomasi ekonomi negaranya demi mencapai keuntungan ekonomi.

Diplomasi ekonomi merupakan strategi suatu negara dalam mengelola hubungan ekonominya, yang melibatkan pengambilan keputusan dalam skala nasional dan selanjutnya dinegosiasikan dalam di arena internasional dengan aktor internasional lainnya (Bayne dan Woolcock, 2007). Diplomasi ekonomi melibatkan pelaku dari negara (termasuk pegawai dan pejabat pemerintah) yang bekerja bersama organisasi internasional seperti Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, Uni Eropa, ASEAN, NAFTA, serta melakukan perundingan satu lawan satu dengan berbagai negara untuk

membentuk kesepakatan ekonomi bilateral. Contohnya termasuk Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, Perjanjian Promosi dan Perlindungan Investasi, Perjanjian Kerjasama Bidang Pariwisata, dan sejenisnya (Zirovcic, 2016).

Tulisan Robertson, East et al. yang dikutip dalam Gener (2018) memberikan penjelasan tentang bagaimana diplomasi ekonomi di negara berkembang dapat beroperasi dalam mengejar reformasi internal. Pertama, kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri di negara-negara berkembang saling memiliki keterkaitan dalam menjalankan fungsinya. Kedua, Kementerian Luar Negeri di banyak negara berkembang menjadi pusat keterlibatan ekonomi internasional (misalnya, APEC). Ketiga, meski dengan keterbatasan sumber daya, manajemen kebijakan luar negeri di negara berkembang menunjukkan kesuksesan yang cukup signifikan. Diplomasi ekonomi dapat dimanfaatkan untuk reformasi internal di negara-negara berkembang, bahkan dengan kemampuan yang terbatas. Selain itu reformasi setelah direalisasikan kemungkinan besar akan menghasilkan peningkatan sumber daya yang pada gilirannya memperluas kemampuan diplomasi ekonomi. Keempat, negara berkembang bertindak reaktif dalam ranah diplomasi.

Adapun fenomena baru dalam diplomasi ekonomi era modern menurut Zirovcic (2016) yaitu mengenai tujuannya dalam mem-*branding* negara. Negara menggunakan sistem organisasi yang berbeda untuk mempromosikan kepentingan ekonomi mereka di lingkungan global, dan sistem seperti itu disebut model diplomasi ekonomi. Menurut Zirovcic (2016) *nation branding* menjadi misi promosi diplomasi suatu negara. Keberhasilan implementasi fungsi ini menentukan keberhasilan *positioning* internasionalnya suatu

negara dan menghasilkan pendapatan tambahan berdasarkan *branding* yang dikenal dan diakui secara luas.

Nation branding merupakan proses di mana gambaran suatu bangsa dapat dibentuk, terus dipantau, dievaluasi, dan diatur secara proaktif guna meningkatkan reputasi negara di skala internasional (Fan, 2010). Pendekatan nation branding bersifat strategis untuk merefleksikan tujuan suatu negara dalam upaya membangun reputasi dengan mempromosikan kepentingan ekonomi, politik, dan sosialnya baik di tingkat nasional maupun internasional. Keberhasilan nation branding dianggap tercapai ketika citra yang digencarkan oleh suatu negara tercermin dalam masyarakat negara yang menjadi sasaran, serta memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor ekonominya.

*Nation branding* bertujuan untuk mengedepankan gambaran positif suatu negara dengan tujuan memperkuat identitas nasional, mendorong ekspor produk, serta menarik minat investasi dan kunjungan wisatawan dari luar negeri (Sun, 2009). Salah satu pendekatan yang umum digunakan oleh negara adalah menjadi tuan rumah acara internasional. Menurut Sun (2009), negara yang berperan sebagai tuan rumah dapat menggunakan acara tersebut sebagai platform untuk memperkenalkan citra nasional dan menerapkan strategi nation branding. Keterlibatan dalam forum internasional skala global diyakini dapat meningkatkan pemahaman global terhadap negara tersebut, berdampak pada peningkatan eksposur, reputasi, serta pengakuan terhadap produk-produk negara tersebut di pasar internasional (Richard, 2010).

## METODE

Penelitian ini termasuk dalam klasifikasi penelitian deskriptif yang mengadopsi

pendekatan kualitatif. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan kata-kata atau frasa, dan tidak memerlukan penggunaan data numerik. Metode deskriptif dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk menggambarkan suatu fenomena sosial berdasarkan informasi yang telah terkumpul. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai upaya pemerintah Indonesia melakukan *branding* sistem ekonomi syariah melalui penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF dan WBG 2018.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Ekonomi Indonesia dan Perkembangannya

Sistem ekonomi merujuk pada cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi tantangan yang muncul ketika masyarakat dan otoritas pemerintah terlibat dalam aktivitas ekonomi. Menurut Dumairy (1996), sistem ekonomi diartikan sebagai suatu struktur yang mengatur serta mengelola hubungan ekonomi antara individu-individu dan berbagai institusi dalam konteks kehidupan tertentu. Fungsi utama dari sistem ekonomi adalah untuk mengevaluasi kebutuhan sumber daya di dalam suatu wilayah atau negara, serta mengatur cara alokasi sumber daya yang sesuai dengan prinsip tertentu (Frans, 2010). Sistem ekonomi meliputi serangkaian aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi, dan investasi yang berlangsung dalam suatu kawasan geografis.

Indonesia menerapkan sistem ekonomi berdasarkan prinsip Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila mengintegrasikan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi Indonesia dan sistem ekonomi campuran yang diimplementasikan melalui kerangka kerja

ekonomi yang demokratis dan strategi ekonomi yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan pemberdayaan kepada semua lapisan masyarakat, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Lebih lanjut, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mengambil langkah dalam menerapkan sistem ekonomi syariah sebagai pendamping sistem ekonomi Pancasila.

Diterapkannya sistem ekonomi syariah di Indonesia bukan berarti menggantikan sistem ekonomi Pancasila yang sebelumnya sudah dijalankan. Kehadiran sistem ekonomi syariah justru melengkapi sistem ekonomi Pancasila. Hal ini karena pada dasarnya prinsip-prinsip yang dianut dari kedua sistem tersebut memiliki landasan yang sama.

### **Dinamika Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia**

Ekonomi syariah adalah suatu kerangka ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Ruang lingkungannya adalah seluruh aspek dalam perekonomian termasuk sektor keuangan dan sektor riil. Awal kemunculan ekonomi syariah di Indonesia ditandai oleh pendirian sebuah lembaga perbankan pada tahun 1991, yakni Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), yang berakar pada prinsip-prinsip hukum syariah. Bank ini dirintis atas inisiatif Majelis Ulama Indonesia (KNEKS, 2018).

Ketika Bank Mu'amalat mulai beroperasi, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa Indonesia menerapkan dua sistem ekonomi dalam sistem perbankan yaitu sistem syariah dan konvensional. Munculnya perbankan syariah di Indonesia menuai antusias dari masyarakat dan membuat bank-bank konvensional kemudian membuka sistem bank syariahnya seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan masih banyak lagi.

Perkembangan sistem ekonomi Syariah di Indonesia menunjukkan kenaikan setiap tahunnya (OJK,2018). Walaupun tidak secara signifikan, akan tetapi hasil yang diperoleh selalu menunjukkan kenaikan angka. Seperti laporan ekonomi syariah yang di keluarkan oleh OJK dalam periode tahun 2018 yang menunjukkan adanya kenaikan dalam aset keuangan syariah yang bertumbuh sebesar 13,97% (OJK,2018). Hingga saat ini ekonomi dan keuangan syariah masih terus menjadi perhatian pemerintah untuk terus dikembangkan. Hal ini karena pemerintah Indonesia ingin menjadikan Indonesia sebagai poros ekonomi syariah di dunia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia terus melakukan upaya-upaya agar ekonomi syariah dapat berkembang.

### **Masterplan Ekonomi Indonesia 2016**

*Masterplan Aksi Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI)* merupakan sebuah rancangan strategis yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini merupakan sebuah langkah awal yang diambil oleh pemerintah dalam mewujudkan ekonomi syariah Indonesia dapat dikenal secara global. Pertamakali MAKSI dibentuk oleh Bappenas dalam *World Islamic Economic Forum* tahun 2016.

Dalam kerangka MAKSI terdapat dua hal yang menjadi fokus tujuan dari *masterplan* ini, yang pertama mengenai perluasan sektor keuangan syariah dan meningkatkan cakupan industri perbankan syariah, pasar modal syariah, dan dana sosial syariah. Kedua adalah mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang akan memegang peran dalam mengkoordinasikan implementasi efektif dari rencana aksi masterplan oleh semua pihak yang berperan dalam pembuatan kebijakan.

MAKSI memiliki visi utama yaitu mewujudkan Indonesia sebagai poros ekonomi syariah dunia. Salah satu bentuk perwujudan

kerangka *masterplan* KNKS melalui kerjasama dan koordinasi dengan pihak eksternal yang dimaksud adalah masuknya agenda ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu forum pembahasan dalam *event* pertemuan tahunan IMF dan WBG 2018. KNKS yang ditugaskan untuk mempelajari dan menata ulang pembiayaan syariah untuk proyek-proyek infrastruktur sejalan dengan pernyataan menteri keuangan Sri Mulyani pada forum pertemuan IMF dan WBG 2018 yang menyatakan akan mendorong peran keuangan syariah dalam pembiayaan infrastruktur dalam skala global maupun lokal (Republika, 2018).

## **Pembahasan Ekonomi Syariah Pra-IMF dan WBG 2018**

### **A. Syariah Ekonomi Festival**

ISEF atau *Indonesia Sharia Economic Festival* adalah suatu acara tahunan yang menghadirkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Acara ini merupakan wadah integrasi berbagai aktivitas dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah yang paling besar di negeri ini. Pertama kali ISEF diadakan yaitu mulai tahun 2014 dengan tujuan untuk mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai poin sentral dalam arah kebijakan, baik dalam lingkup nasional maupun global (Bank Indonesia, 2016). Dalam upaya mencapai visinya, ISEF telah mengalami transformasi dari acara dengan fokus lokal dan nasional menjadi sebuah acara yang memiliki dampak internasional.

### **B. Ekonomi Syariah pada *side event Voyage to Indonesia***

*Voyage to Indonesia 2018* adalah serangkaian acara yang diselenggarakan sebagai bagian dari persiapan Indonesia dalam menjadi penyelenggara *event* pertemuan tahunan IMF dan WBG 2018. Acara ini menjadi platform untuk memperkenalkan budaya dan destinasi

pariwisata Indonesia kepada para peserta serta menyediakan informasi terkini mengenai kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia (Kompas, 2018). Selama acara *Voyage to Indonesia*, para peserta pertemuan tahunan IMF dan WBG 2018 mendapatkan kesempatan untuk menjelajahi keberagaman budaya Indonesia melalui pameran seni, tarian tradisional, pameran kuliner, dan pertunjukan kesenian dari berbagai daerah di Indonesia.

*Voyage to Indonesia* juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membahas tentang ekonomi syariah. Sebagai penyelenggara *event* pertemuan tahunan ini Indonesia aktif mengangkat isu-isu terkait praktik ekonomi syariah yang semakin relevan dan berkembang di tingkat global. Dalam berbagai forum dan sesi diskusi, para peserta dipaparkan mengenai konsep dasar ekonomi syariah, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, serta bagaimana penerapan ekonomi syariah bisa berkontribusi dengan efek positif terhadap masyarakat dan keseluruhan aspek ekonomi (Zahid, 2018).

## **Upaya Pemerintah Indonesia Melakukan Branding Sistem Ekonomi Syariah dalam Pertemuan Tahunan IMF dan WBG 2018**

### **• Peluncuran *Waqf Core Principles (WCP)***

WCP merupakan standar global yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan tata kelola wakaf, baik di Indonesia secara khusus maupun secara umum di seluruh dunia. Peluncuran WCP di hari terakhir pelaksanaan forum IMF dan WBG 2018 diinisiasi oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, kemudian Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, dan Mohamed Nouri Jouini selaku Wakil Presiden *Islamic Development Bank (IDB)* (BWI, 2018).

Tim utama yang bertanggung jawab dalam merancang WCP terdiri dari Bank

Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (IRTI-IDB) (KNEKS, 2020). Upaya peluncuran WCP ini juga melibatkan sejumlah negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Kolaborasi antara negara-negara anggota OKI dalam acara peluncuran ini menandai komitmen bersama untuk memajukan potensi wakaf dan meningkatkan pengelolaannya guna mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Peluncuran WCP ini menjadi platform kolaboratif untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan wakaf. Melalui inisiatif ini, negara-negara anggota dapat saling belajar dari praktik terbaik satu sama lain dan mengadaptasinya sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing. Kolaborasi multilateral ini mencerminkan semangat kerjasama internasional dalam memajukan wakaf sebagai instrumen penting untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

Selanjutnya, WCP diharapkan dapat menjadi panduan bagi negara-negara yang memiliki rencana wakaf dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mereka. Panduan ini mencakup aspek integritas, pengelolaan risiko, sistem tata kelola, dan kerangka regulasi hukum yang berkaitan dengan program wakaf (BWI, 2018).

- **Pengenalan Green Sukuk**

Pada pertemuan tahunan IMF dan WBG 2018 pemerintah Indonesia mengenalkan *Green Sukuk* yang merupakan instrumen investasi obligasi syariah yang memiliki tujuan untuk mendukung proyek lingkungan. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) berlandaskan prinsip syariah, dengan menitikberatkan pada program pendanaan

untuk proyek-proyek yang bersifat ramah lingkungan (CNBC, 2020).

Sejak penerbitan *green sukuk* pertama pada Maret 2018, Indonesia sudah mencapai hasil yang cukup signifikan. Pemerintah berhasil mengumpulkan pendapatan sejumlah USD1,25 miliar atau setara dengan Rp17,75 triliun dengan nilai tukar Rp14.200 per dolar AS. Menurut catatan Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan, permintaan atas *green sukuk* dalam edisi Maret 2018 mencapai USD3 miliar (sekitar Rp42,6 triliun), atau setara dengan 2,4 kali lipat dari jumlah yang diterbitkan. Dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah yang diterbitkan melalui situs resmi Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa *green sukuk* berhasil digunakan sebanyak 51% untuk melakukan pembiayaan ulang proyek tahun 2016, sementara 49% digunakan untuk mendanai proyek baru di tahun 2018. Proyek-proyek dari tahun 2016 yang dibiayai ulang sepenuhnya terfokus pada proyek aksi mitigasi (Indonesia go.id, 2020).

Dalam acara pertemuan tahunan IMF dan WBG 2018 ini Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkenalkan dan mempopulerkan pertama kalinya instrumen keuangan syariah berupa *Green sukuk* yang juga dianggap sebagai bentuk nyata dari komitmen ekonomi berwawasan lingkungan. Pengenalan *Green sukuk* sebagai sarana pembiayaan memiliki peluang besar untuk merangsang perkembangan sektor ekonomi berkelanjutan dan menghasilkan efek positif yang meluas pada lingkungan dan masyarakat. Dalam forum IMF dan WBG 2018, perbincangan mengenai *Green sukuk* memberikan dorongan untuk mendorong lebih banyak negara dan institusi keuangan untuk mengadopsi instrumen ini guna memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim secara global (Falah, 2018).

Mengutip dari tulisan Mahendra (2023) bahwa suatu acara perhelatan internasional ternyata dapat dimanfaatkan sebagai momen sebuah negara untuk meningkatkan citra negara, maka dalam pertemuan tahunan IMF dan WBG 2018 Indonesia secara aktif mempromosikan dan membranding *green sukuk* sebagai instrumen keuangan yang inovatif untuk mendukung investasi berkelanjutan di sektor lingkungan. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil oleh Indonesia dalam mempromosikan *green sukuk* di forum tersebut diantaranya pertama, penyampaian Informasi: Indonesia menyampaikan informasi secara komprehensif tentang *green sukuk* kepada peserta forum IMF WBG. Kedua, *Showcase* Proyek Berkelanjutan. Ketiga, mempromosikan keunggulan *Green sukuk* dengan menekankan bahwa *green sukuk* adalah cara yang efektif untuk mengalokasikan dana secara berkelanjutan dan menarik investor yang peduli terhadap lingkungan. Keempat, yaitu kolaborasi dan Kemitraan, Indonesia berusaha untuk membangun kemitraan dengan negara-negara dan lembaga keuangan lainnya dalam mempromosikan *green sukuk*. Indonesia mengajak negara-negara lain dan lembaga keuangan untuk mengadopsi dan mengembangkan instrumen serupa, serta membagikan pengetahuan dan pengalaman terkait penggunaan *green sukuk*.

Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia berharap dapat meningkatkan kesadaran dan minat internasional terhadap *green sukuk* sebagai instrumen keuangan yang berkelanjutan dan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor lingkungan.

### **Kerjasama Indonesia dengan Negara-Negara Peserta IMF-WBG 2018**

Keberadaan potensi ekonomi syariah yang diproyeksikan sebagai alternatif bagi

pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur Indonesia yang bersifat strategis menjadi salah satu alasan bagi pemerintah Indonesia untuk mengajak seluruh delegasi IMF dan WBG 2018 yang hadir untuk sama-sama terlibat pada pengembangan ekonomi syariah terutama dalam hal pendanaan proyek infrastruktur.

Untuk mencapai proyeksi ini maka melalui pertemuan tahunan IMF dan WBG 2018 pemerintah menggaungkan terbukanya Indonesia pada iklim investasi ekonomi syariah. Salah satu *lobby* yang berhasil dilakukan adalah kerjasama antara Maybank dan PT Sarana Multi Infrastruktur, di mana mereka menyediakan layanan Foreign Currency Hedging iB atau produk lindung nilai mata uang berbasis syariah sebesar US\$128 juta (Kementerian Keuangan, 2018). Kesempatan investasi ini adalah bukti nyata bagaimana keterlibatan dan peran pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur dan inovasi instrumen keuangan berbasis ekonomi syariah dalam pembiayaan infrastruktur.

Sejalan dengan *branding* yang coba dibuat oleh pemerintah Indonesia daya tarik yang coba diciptakan adalah mempromosikan keuangan yang memiliki daya tarik bagi kapital internasional dan menunjukkan inklusivitas dimana Indonesia melibatkan semua pihak termasuk swasta dalam pengembangan pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Pada akhirnya, selain membentuk Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah, meminjam dari pernyataan Cerny (1999) *nation branding* juga akan mempengaruhi bentuk perubahan kebijakan yaitu perubahan dari intervensi makro-ekonomi menjadi mikro-ekonomi, mengejar keuntungan kompetisi sebagai hal yang berbeda dari keuntungan komparatif, menegaskan pada target inflasi dan moneterisme neoliberal umum, dan perubahan dari maksimalisasi kesejahteraan perubahan

dari maksimalisasi kesejahteraan publik menjadi dukungan dan promosi terhadap usaha, inovasi, dan keuntungan dalam sektor publik dan swasta.

Van Bergeijk & Moons (2007) mengemukakan bahwa dalam diplomasi ekonomi terdapat tiga buah elemen, pendekatan pertama melibatkan penggunaan pengaruh serta ikatan politik untuk mendorong dan memengaruhi aktivitas perdagangan dan investasi. Kedua, strategi ini memaksimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan biaya potensi konflik dan memperkuat relasi yang saling menguntungkan. Yang ketiga adalah usaha untuk menggabungkan iklim politik dan faktor lingkungan internasional untuk mencapai sasaran ini. Jika melihat ketiga elemen diatas Indonesia dalam kesempatannya menjadi penyelenggara *event* pertemuan tahunan IMF dan WBG 2018 melakukan hubungan politik dengan negara-negara peserta untuk mempromosikan ekonomi syariahnya ke ranah global. Kemudian Indonesia memaksimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk memperkuat relasi yang saling menguntungkan seperti hubungan diplomatiknya dengan Malaysia sehingga menghasilkan kerjasama investasi Maybank dengan PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia.

## PENUTUP

Terpilihnya Indonesia sebagai penyelenggara acara pertemuan tahunan IMF dan WBG 2018 membuka kesempatan bagi Indonesia dalam melakukan *branding* ekonomi syariah. Indonesia menggunakan *nation branding* untuk memperkenalkan ekonomi syariah kepada dunia dengan memanfaatkan pertemuan tahunan IMF dan WBG 2018 dengan tujuan agar dunia dapat melihat potensi besar ekonomi syariah yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu dalam mewujudkan kepentingan

ekonomi dengan memperluas jaringan kerjasama antar negara peserta, pemerintah Indonesia menjalankan diplomasi ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh Darma (2018), Diplomasi adalah suatu media yang berperan signifikan didalam melaksanakan sebuah *national interest* sebuah negara dalam menjalin hubungannya dengan negara lain. Maka strategi Indonesia dalam mencapai kepentingannya dalam mempromosikan *branding* sistem ekonomi syariah yaitu dengan melakukan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain.

Seperti yang dikatakan oleh Simon Anholt (2006) *nation branding* tidak bisa dicapai hanya dengan sekali percobaan melainkan harus berjalan secara kontinuitas agar dapat membentuk citra negara yang baik. Pemerintah Indonesia dalam melakukan *branding* sistem ekonomi syariah sudah dilakukan jauh sebelum *event* pertemuan tahunan IMF dan WBG 2018 ini berlangsung. Dimulai dari penyelenggaraan *Indonesia Sharia Economic Forum* (ISEF) pada 2014 kemudian pembentukan *masterplan* pada 2016, dan dilanjutkan pada *side event Voyage to Indonesia* yang kemudian menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mempromosikan ekonomi syariah ke lingkup global.

Dalam pertemuan tahunan IMF dan WBG 2018 adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan *branding* sistem ekonomi syariah yaitu dengan meluncurkan *Waqf Core Principles* (WCP), pengenalan *Green Sukuk* yang merupakan obligasi syariah dalam bentuk pemanfaatan lingkungan, dan kerjasama dengan negara-negara peserta IMF dan WBG 2018.

Jika melihat tiga elemen diplomasi ekonomi yang dikemukakan oleh bergeijk dan Moons (2007) dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Indonesia dalam kesempatannya menjadi penyelenggara pertemuan tahunan IMF dan WBG 2018 melakukan hubungan politik

dengan negara-negara peserta untuk mempromosikan ekonomi syariahnya ke ranah global. Kedua, Indonesia memaksimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk memperkuat relasi yang saling menguntungkan seperti hubungan diplomatiknya dengan Malaysia sehingga menghasilkan kerjasama investasi Maybank dengan PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia. Ketiga, dalam mencapai tujuan dalam diplomasi ekonomi memerlukan upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif antara berbagai pihak. Indonesia berupaya dalam mempromosikan *green sukuk* untuk menarik investor dalam membeli surat obligasi syariah dengan harapan mencapai hasil yang diinginkan dalam hal pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi antarnegara.

### Daftar Pustaka

- Andrianto. Firmansyah, Anang. (2019). Bank Syariah : Implementasi Teori dan Praktek. CV. Penerbit Kiara Media.
- Anggara Darma, A., Fasisaka, I., & Kawitri Resen, P. (2018). Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Media Diplomasi antara Indonesia dengan Thailand melalui Program Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) pada Tahun 2011-2015. *DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)*, 1(1).
- Arus, P. 2015. Nation Branding; Komunikasi Kenegaraan Atau Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Universitas Multimedia Nusantara
- Bank Indonesia. (2021). Majalah Bank Indonesia Bicara Mewujudkan RI Pusat Ekonomi Syariah Dunia. Bank Indonesia.
- Ekonomi. 10 Oktober 2018. Keuangan Syariah Diminta Terlibat Langsung Proyek Infrastruktur. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181010/9/847766/keuangan-syariah-diminta-terlibat-langsung-proyek-infrastruktur> Pada 01 Juli 2023
- Ekonomi Bisnis. 12 Oktober 2017. Pertemuan IMF-WBG 2018 : The Voyage to Indonesia 2018 Digelar di Washington. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20171012/9/698450/pertemuan-imf-wb-2018-the-voyage-to-indonesia-2018-digelar-di-washington> Pada 10 Juli 2023
- Hassan, M. K., Saraç, M., & Khan, A. (2018). Sustainable Development Goals And Islamic Finance. A Presentation Material For Bank Indonesia Plenary Session In Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), Surabaya
- Hendra Tanjung. 18 Agustus 2022. Waqf Core Principles. Diakses melalui <https://hendritanjung.com/2022/08/18/waqf-core-principles-3/> Pada 10 Juli 2023
- Indonesia Investment. 28 April 2018. Impact of Asian Games & IMF-World Bank Meeting on Indonesian Economy. Diakses melalui <https://www.indonesiainvestments.com/id/news/todays-headlines/impact-of-asian-games-imfworld-bank-meeting-on-the-indonesian-economy/item8765> Pada 29 Januari 2023.
- Info Publik. 10 Oktober 2018. Minister Underscores Importance of Green 'Sukuk' for Sustainable Development. Diakses melalui <https://www.infopublik.id/kategori/am-imf-wbg-2018/302457/minister-underscores-importance-of-green-sukuk-for-sustainable-development?show=> Pada 15 Juli 2023
- Investor ID. 04 September 2018. Keuntungan Penyelenggaraan Annual Meetings IMF-WBG 2018. Diakses melalui <https://investor.id/archive/keuntunganpenyelenggaraan-annual-meetings-imf-wbg-2018> Pada 29 Januari 2023
- Jalil, Md., Rahman M.K., (2014). The Impact of Islamic Branding on Consumer Preference Towards Islamic Banking Services : An Empirical Investigation in Malaysia. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 209-229.
- Kavoura, A. (2014). A Concetual Communication Model for Nation Branding In the Greek Framework. *Procedia*, Hal. 32-39
- Kominfo. 22 Januari 2021. Pentingnya Transformasi Wakaf Indonesia Menuju Wakaf Produktif. Diakses melalui <https://www.kominfo.go.id/content/detail/3>

- 2260/pentingnya-transformasi-wakaf-indonesia-menuju-wakaf-produktif/0/berita Pada 15 Juli 2023
- Kompas.02 Oktober 2018. Jokowi Ingin Pertemuan IMF-World Bank Berdampak bagi Ekonomi Indonesia. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/02/15364271/jokowi-inginpertemuan-imf-world-bank-berdampak-bagi-ekonomi-indonesia> Pada 29 Januari 2023.
- Kompas, 27 Oktober 2022. Pengertian Sistem Ekonomi Menurut Para Ahli. Diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/27/093000869/pengertian-sistem-ekonomi-menurut-ahli?page=all> Pada 14 Juli 2023
- Kumparan. 10 November 2017. Wapres JK : Penerapan Ekonomi Syariah Itu Mudah. Diakses melalui <https://kumparan.com/golkar-celebes/wapres-jk-penerapan-ekonomi-syariah-itu-mudah> Pada 10 Juli 2023
- Lail, M.M.J., (2022). Optimalisasi Peran Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 81-101.
- Liputan 6. 14 Oktober 2018. BI Luncurkan Prinsip Pengelolaan Wakaf di Hari Terakhir Pertemuan IMF-Bank Dunia. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3667180/bi-luncurkan-prinsip-pengelolaan-wakaf-di-hari-terakhir-pertemuan-imf-bank-dunia#div-gpt-ad-liputan6-topfrm-oop> Pada 12 Juli 2023
- Mahendra, G., Putri, P., & Resen, P. (2023). Rasionalisasi Keputusan Rusia Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia FIFA 2018. *DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)*, 2(2), 383-397.
- Mardi, Moh. Ekonomi Syariah: Eksistensi dan Kedudukannya di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 20-32.
- Marsudi, K.E.R., Purbasari, V.A., (2022). Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 27-42.
- Marwing, Anita. Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. 2(2), 211-226
- Murphy, J. (1990). *Brand Strategy*. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall.
- Nainggolan, B., (2017). Penyelenggaraan Ekonomi Syariah dalam Tantangan. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(1), 46-60.
- Sitorus, R., Putri, P., & Priadarsini, N. (2020). Kepentingan Indonesia menjadi Tuan Rumah Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group (WBG) tahun 2018. *DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)*, 1(1).
- The Jakarta Post. 10 Oktober 2018. Indonesia Introduce Green Sukuk at IMF-WBG Annual Meetings. Diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2018/10/09/indonesia-introduces-green-sukuk-at-imf-world-bank-annual-meetings.html> Pada 15 Juli 2023
- The Jakarta Post. 28 Oktober 2018. Indonesia to host IMF-World Bank annual meeting in 2018. Diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2016/12/01/indonesia-to-host-imf-world-bank-annual-meeting-in-2018.html> Pada 29 Desember 2021.
- The World Bank. 13 Oktober 2018. Pertemuan Tahunan Bank Dunia. Diakses melalui <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2018/10/13/world-bank-imf-annual-meetings-2018-development-committee-communicue> pada 28 Desember 2021.
- Wallstreet Mojo, 23 Januari 2020. What Is an Economic System?. Diakses melalui <https://www.wallstreetmojo.com/economic-system/> Pada 13 Juli 2023